eMagazine

PARLEMENTARIA

KOTA TANGERANG

Menguatkan Aspirasi Meneguhkan Representasi

Reses DPRD Kota Tangerang Masa Sidang II 2025-2026



Scan For Visit Website

EDISI IV/APRIL 2026

REDAKSI



PENERBIT
DPRD Kota Tangerang

PEMBINA
H. Rusdi, S.Th.I., M.S.M
Andri S. Permana, S.Sos, M.AP
Arief Wibowo, ST. MM
Ir. H. Turidi Susanto, S.T., M.Tr,IP

KETUA
Teddy Bayu Putra, S.SOS., M.SI

WAKIL KETUA
Sony Maulana, S.H., M.KKK

SEKRETARIS
Ginasya Oktaviani, S,STP., MM

REPORTER
Awien Sinatrya
Desi Wahyuni
Erdi Alfarizky
Liesdia Desmawati

FOTO/VIDEOGRAPHER
Ananda Adining Putra
Muhamad Dimas Khoiro
Muhammad Iqbal

FOTO/VIDEO EDITOR
Roes Nurtiyono

DESAIN GRAFIS
Tri Waluyo Adhie

EMAIL
dprdkotatng@gmail.com
@dprdkotatangerang
@dprdkotatangerang
@dprdkotatangerang
dprd.kotatangerang.go.id

ALAMAT
DPRD Kota Tangerang
Gedung Pusat Pemerintahan
Jl. Satra Sudirman No 1

DARI MEJA

REDAKSI

SUARA WARGA DALAM AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH

Reses masa sidang II Tahun Anggaran 2025-2026 menjadi fokus utama dalam edisi majalah internal DPRD Kota Tangerang kali ini. Kegiatan yang dilaksanakan di lima daerah pemilihan ini memperlihatkan bagaimana peran representasi dijalankan secara langsung melalui pertemuan antara anggota dewan dan masyarakat.

Melalui reses, berbagai aspirasi mengemuka dan mencerminkan kebutuhan nyata warga di masing-masing wilayah. Persoalan infrastruktur lingkungan, penanganan banjir, hingga pelayanan publik menjadi isu yang paling banyak disampaikan, sekaligus menunjukkan tantangan pembangunan yang masih perlu mendapat perhatian serius.

Edisi ini mencoba merekam dinamika tersebut secara komprehensif, dengan menghadirkan beragam sudut pandang dari lapangan. Kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana fungsi penyerapan aspirasi dijalankan dalam praktik.

Selain sebagai sarana menyerap aspirasi, reses juga menjadi ruang evaluasi terhadap program pembangunan yang telah berjalan. Interaksi langsung dengan masyarakat memberikan umpan balik yang penting dalam menilai efektivitas kebijakan serta mengidentifikasi kebutuhan yang belum terakomodasi.

Redaksi melihat bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor kunci dalam menindaklanjuti hasil reses. Aspirasi yang dihimpun perlu diterjemahkan secara sistematis ke dalam perencanaan dan penganggaran agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui edisi ini, redaksi berharap informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan reses di lima dapil serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan Kota Tangerang yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

DAFTAR ISI



HAL. 6 **LAPORAN UTAMA**
ASPIRASI WARGA DIPRIORITASKAN DALAM POKIR DEWAN



HAL. 28 **RDP KOMISI I**
SOROTI KINERJA DISKOMINFO, MINTA SOSIALISASI PROGRAM LEBIH OPTIMAL



HAL. 30 **PENERTIBAN PASAR SIPON**
DIMINTA LEBIH KOLABORATIF DENGAN MELIBATKAN PERAN MASYARAKAT



HAL. 31 **DESENTRALISASI PENGOLAHAN SAMPAH**
RDF DIUSULKAN HADIR DI TIAP KECAMATAN



HAL. 34
DPRD DUKUNG LSDP TANGANI SAMPAH KOTA TANGERANG



LAPORAN UTAMA

MENGUATKAN ASPIRASI MENEGUHKAN REPRESENTASI

RESES DPRD KOTA TANGERANG MASA SIDANG II 2025–2026

Reses masa sidang II Tahun Anggaran 2025-2026 menjadi momentum strategis bagi anggota DPRD Kota Tangerang untuk kembali menyapa konstituen secara langsung di lima daerah pemilihan atau dapil. Kegiatan ini berfungsi sebagai ruang interaksi substantif antara wakil rakyat dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih responsif.

DI tengah dinamika perkotaan yang terus berkembang, reses hadir sebagai instrumen penting dalam menyerap aspirasi berbasis kebutuhan riil warga di setiap dapil. Berbagai persoalan mengemuka, mulai dari infrastruktur lingkungan, penanganan banjir, pelayanan publik, hingga isu sosial yang berkembang di masing-masing wilayah.

Pelaksanaan reses di lima dapil menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Kehadiran warga dalam forum dialog menandakan adanya harapan besar agar aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret dalam kebijakan pemerintah daerah.

Anggota DPRD sebagai representasi politik masyarakat memiliki peran krusial dalam menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan eksekutif di tiap dapil. Reses menjadi kanal utama untuk memastikan bahwa suara masyarakat dapat dihimpun dan diperjuangkan dalam forum legislatif.

Berbagai masukan yang dihimpun selama reses mencerminkan kompleksitas persoalan perkotaan di lima dapil. Permasalahan banjir masih menjadi isu dominan di sejumlah wilayah, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, warga di berbagai dapil juga menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas umum lainnya. Hal ini menjadi indikator bahwa pembangunan fisik masih menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tidak kalah penting, isu pelayanan publik turut menjadi perhatian dalam reses kali ini. Masyarakat mengharapkan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan yang lebih cepat, transparan, dan merata di seluruh dapil.

Reses juga menjadi sarana evaluasi bagi anggota DPRD terhadap program yang telah berjalan di wilayah masing-masing. Melalui dialog langsung, wakil rakyat dapat mengukur efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan serta mengidentifikasi kendala di lapangan.

Dalam konteks fungsi pengawasan, hasil reses dari lima dapil menjadi bahan penting bagi DPRD untuk memastikan bahwa program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi dasar dalam pembahasan kebijakan dan anggaran ke depan.

Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menindaklanjuti hasil reses di seluruh dapil. Tanpa koordinasi yang kuat, aspirasi masyarakat berpotensi tidak terakomodasi secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah.

Lebih jauh, reses juga memperkuat legitimasi DPRD sebagai lembaga representatif. Kedekatan dengan masyarakat di masing-masing dapil menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga di lima dapil merupakan refleksi dari kebutuhan nyata yang harus menjadi prioritas dalam kebijakan daerah.

Dengan demikian, reses merupakan bagian integral dari mekanisme demokrasi lokal. Kegiatan ini memastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif dan berbasis pada kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Kota Tangerang.

Ke depan, hasil reses masa sidang II ini diharapkan dapat diolah secara sistematis dan terukur, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pada akhirnya, reses menjadi cermin komitmen DPRD Kota Tangerang dalam menjalankan fungsi representasi secara optimal, menguatkan aspirasi, meneguhkan peran, dan memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan masyarakat di lima daerah pemilihan. ■ SIN

ASPIRASI WARGA DIPRIORITASKAN DALAM POKIR DEWAN

RESES Anggota DPRD Kota Tangerang pada Masa Sidang Tahun 2025-2026 kembali menjadi momentum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat secara langsung di masing-masing daerah pemilihan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituen, tetapi juga memperkuat fungsi representasi DPRD dalam memastikan kebutuhan masyarakat terserap secara optimal.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, menegaskan bahwa pelaksanaan reses pada periode ini telah dijadwalkan secara sistematis dan terukur. Ia menyampaikan bahwa dalam satu tahun, reses akan dilaksanakan sebanyak tiga kali sebagai bagian dari mekanisme kerja DPRD yang telah diatur dalam tata tertib.

Menurut Rusdi, intensitas pelaksanaan reses yang dilakukan secara berkala tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyerapan aspirasi masyarakat. Dengan frekuensi yang lebih terencana, setiap anggota dewan memiliki ruang yang cukup untuk turun langsung ke lapangan dan memahami persoalan yang dihadapi warga.

Ia menjelaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui reses, berbagai masukan dari masyarakat dapat dihimpun secara komprehensif dan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja DPRD.

"Reses akan berjalan selama tiga kali dalam setahun di masa sidang 2025-2026. Ini menjadi komitmen kami untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan setiap aspirasi dapat terakomodasi dengan baik," ujar Rusdi.

Lebih lanjut, Rusdi menuturkan bahwa seluruh hasil reses yang diperoleh dari masing-masing anggota DPRD akan dikumpulkan secara sistematis. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada aspirasi yang terlewatkan dan seluruhnya tercatat secara administratif.

"Pasca reses, semua aspirasi akan kami kumpulkan dan masuk ke dalam pokok-pokok pikiran dewan. Ini menjadi tahapan penting agar setiap usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara terarah," lanjut Rusdi.

Setelah proses pengumpulan, aspirasi tersebut akan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran dewan atau pokir. Pokir menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih luas.

Rusdi menegaskan bahwa pokir dewan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses memiliki peluang besar untuk direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan.

Dalam proses pengolahan aspirasi tersebut, DPRD juga menerapkan mekanisme penyusunan berdasarkan skala prioritas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak dapat segera ditangani oleh pemerintah daerah.

"Aspirasi yang masuk akan kami urutkan berdasarkan skala prioritas. Ini penting agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan utama masyarakat," jelas Rusdi.

Ia menambahkan bahwa beberapa isu yang kerap menjadi perhatian utama masyarakat antara lain permasalahan infrastruktur jalan dan penanganan banjir. Kedua hal ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas dan kesejahteraan warga.



Ilustrasi Dewan DPRD Kota Tangerang saat reses dan mendengarkan aspirasi warga dan menjadi sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituen, juga memperkuat fungsi representasi DPRD dalam memastikan kebutuhan

Permasalahan jalan, seperti kerusakan maupun kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur, menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan dalam setiap reses. DPRD berkomitmen untuk mengawal hal tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Selain itu, persoalan banjir juga menjadi perhatian serius yang terus diupayakan penanganannya secara berkelanjutan. DPRD mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Rusdi menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan reses tidak hanya diukur dari banyaknya aspirasi yang dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi tersebut dapat direalisasikan. Oleh karena itu, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil reses.

Dengan mekanisme reses yang terstruktur dan berkesinambungan, DPRD Kota Tangerang optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aspirasi yang terserap dengan baik diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan. ■ SIN

DAPIL I KECAMATAN TANGERANG, KARAWACI

RUSDI, KETUA DPRD KOTA TANGERANG

SEKTOR PELAYANAN KESEHATAN JADI SALAH SATU PRIORITAS UTAMA



KETUA DPRD Kota Tangerang melaksanakan kegiatan Reses Kedua masa sidang 2025-2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) I. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah RW 006, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, pada Minggu (29/3/2026).

Reses ini menjadi agenda strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat secara langsung. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dengan masyarakat dalam upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, menegaskan bahwa sektor pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Salah satu usulan yang mengemuka adalah kebutuhan pembangunan Puskesmas di Kelurahan Buaran Indah.

Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan Puskesmas tersebut telah melalui proses kajian teknis oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap penentuan lokasi yang dinilai strategis dan mampu menjangkau masyarakat secara optimal.

"Ke depan, kami akan terus mendorong dan memfasilitasi pembangunan Puskesmas di Kelurahan Buaran Indah, dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan yang efektif serta aksesibilitas bagi masyarakat," ujar Rusdi.

Selain isu kesehatan, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian utama dalam dialog antara Ketua DPRD dengan warga. Permasalahan ini dinilai membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Warga saat menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Reses Dapil I di wilayah RW 006, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, pada Minggu (29/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Rusdi menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga sebagai langkah awal yang fundamental.

"Kami mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga. Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menghadirkan fasilitas bank sampah di wilayah RW 006 sebagai solusi yang berkelanjutan," tambahnya.

Dalam forum tersebut, warga juga menyampaikan berbagai masukan terkait kebutuhan lingkungan dan pelayanan publik lainnya. Dialog berlangsung secara interaktif dan konstruktif, mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Ketua RW 006 Kelurahan Buaran Indah, Sabiti, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan reses tersebut. Ia menilai forum ini menjadi sarana efektif bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan direspons secara langsung. Harapan kami, setiap masukan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara optimal," ungkap Sabiti.

Lebih lanjut, Sabiti juga menyampaikan apresiasi atas realisasi program sebelumnya, yakni bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang di wilayah RW 006. ■ SIN





RUSDI
Ketua DPRD Kota Tangerang





ARIEF WIBOWO, WAKIL KETUA II DPRD KOTA TANGERANG

MINTA SERAH TERIMA ASET FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM JANGAN DIPERSULIT



WAKIL Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, melaksanakan kegiatan Reses Kedua masa sidang 2025-2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Tangerang. Kegiatan tersebut berlangsung di Perumahan Duta Asri, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, pada Sabtu (28/3/2026).

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari agenda rutin DPRD Kota Tangerang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui forum ini, anggota dewan dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi warga di wilayahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Arief Wibowo menerima berbagai aspirasi warga, dengan fokus utama pada persoalan serah terima aset fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Tangerang. Persoalan ini dinilai krusial karena berdampak langsung terhadap kualitas infrastruktur di lingkungan perumahan.



Warga saat menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Reses Dapil I di Perumahan Duta Asri, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, pada Sabtu (28/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa belum dilakukannya serah terima aset menjadi kendala utama dalam pengalokasian anggaran daerah. Kondisi ini menghambat upaya perbaikan serta pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

"Karena belum diserahterimakan, maka APBD belum dapat dialokasikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini akan kami tindak lanjuti bersama pihak terkait, baik pengembang, Dinas PUPR, maupun pengurus lingkungan setempat," ujar Arief.



Lebih lanjut, Arief menegaskan bahwa esensi dari kegiatan reses adalah menjaring aspirasi masyarakat secara komprehensif. Ia menilai bahwa sebagai wakil rakyat, komunikasi dengan masyarakat tidak harus terbatas pada kegiatan formal semata.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kapan saja dan melalui berbagai saluran komunikasi. Hal tersebut menjadi peluang untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga legislatif.

"Kami harus terbuka kepada masyarakat melalui jalur komunikasi yang memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan DPRD. Namun demikian, pertemuan tatap muka seperti reses tetap memiliki nilai tersendiri, terutama dalam menjaga kedekatan dan silaturahmi," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, suasana dialog berlangsung interaktif. Warga menyampaikan berbagai masukan dan harapan, terutama terkait percepatan penanganan persoalan infrastruktur lingkungan yang terdampak belum diserahterimakannya aset.

Selain itu, Arief juga menunjukkan komitmennya dalam membuka akses komunikasi langsung dengan masyarakat. Ia memberikan kontak pribadi kepada warga sebagai bentuk keterbukaan dalam menerima aspirasi maupun pengaduan.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat. Salah satu warga, Subroto, menyampaikan bahwa keterbukaan tersebut menjadi bentuk etika pelayanan publik yang baik dari seorang wakil rakyat.

"Beliau telah memberikan kontak kepada warga, sehingga kami dapat menyampaikan aspirasi maupun melakukan tindak lanjut atas berbagai keluhan yang ada di lingkungan kami," ungkap Subroto.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak-pihak terkait, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat Perumahan Duta Asri dapat terselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. ■ SIN



Arief Wibowo
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang

DAPIL II BATUCEPER, BENDA, NEGLASARI

M. HAFIDZ FIRDAUS, WAKIL KETUA KOMISI IV FRAKSI PKB

KEMACETAN DAN JALAN RUSAK BIKIN MOBILITAS WARGA TERHAMBAT



Warga saat menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Reses Dapil II di RT 004/RW 003, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, pada Minggu (29/3/2026).

ANGGOTA DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hafidz Firdaus, melaksanakan kegiatan Reses Kedua masa sidang 2025-2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) II. Kegiatan tersebut berlangsung di RT 004/RW 003, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, pada Minggu (29/3/2026).

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari agenda DPRD Kota Tangerang dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Forum ini menjadi sarana penting bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah isu strategis mengemuka, di antaranya persoalan kemacetan lalu lintas, kondisi infrastruktur jalan, serta permasalahan banjir yang masih kerap terjadi di wilayah Batuceper dan sekitarnya.

Permasalahan kemacetan menjadi salah satu perhatian utama yang disampaikan masyarakat. Titik-titik rawan kemacetan, seperti di perlintasan pertigaan Stasiun Poris dan sepanjang Jalan Benteng Betawi, dinilai memerlukan penanganan yang serius dan terencana.



"Persoalan kemacetan yang kerap terjadi di perlintasan pertigaan Stasiun Poris serta di Jalan Benteng Betawi menjadi perhatian utama. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan juga menjadi perhatian serius," ujar Hafidz.

Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan turut menjadi keluhan masyarakat. Perbaikan jalan dinilai penting untuk menunjang mobilitas warga serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.



Permasalahan banjir juga menjadi isu yang banyak disampaikan dalam forum tersebut. Kawasan Poris Raya yang meliputi Poris Jaya, Poris Gaga, dan Poris Gaga Baru masih kerap terdampak banjir, terutama pada saat curah hujan tinggi.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, M. Hafidz Firdaus menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Mudah-mudahan dengan adanya reses serentak yang dilaksanakan selama beberapa hari ini, Pemerintah Kota Tangerang dapat mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat. Harapannya, pembangunan infrastruktur dapat lebih merata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pemerataan pembangunan menjadi hal penting, khususnya bagi wilayah di Dapil II yang meliputi Kecamatan Batuceper, Neglasari, dan Benda.

Kegiatan reses ini juga dihadiri oleh unsur pemerintah wilayah, di antaranya Lurah Poris Jaya, Indra Janusubekti, beserta jajaran. Kehadiran aparatur pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Menurut Hafidz, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah di tingkat kewilayahan menjadi kunci dalam memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara optimal.

"Sinergi antara aparatur pemerintah dengan DPRD sangat penting agar setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan," pungkasnya.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan seluruh aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang. ■ SIN



M. Hafidz Firdaus
Wakil Ketua Komisi IV Fraksi PKB

TEJA KUSUMA, ANGGOTA KOMISI IV FRAKSI PDI PERJUANGAN

PEMBENAHAN SISTEM DRAINASE SOLUSI KONKRET PENANGANAN BENCANA BANJIR



ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Teja Kusuma, melaksanakan kegiatan Reses Kedua masa sidang 2025–2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) II. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Timbangan, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper.

Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat. Forum ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait infrastruktur dan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah isu strategis mengemuka, di antaranya persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan permukiman serta kondisi infrastruktur yang dinilai belum memadai. Permasalahan ini menjadi perhatian utama warga dalam dialog bersama anggota dewan.

Teja Kusuma menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan sarana utama dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui forum ini, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diinventarisasi untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada.

"Kegiatan reses ini kami laksanakan untuk fokus pada penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Batuceper. Berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan dalam perumusan kebijakan," ujar Teja.

Dalam rangka memperkuat tindak lanjut aspirasi, kegiatan tersebut turut menghadirkan anggota DPR RI Komisi I, Yulius Setiarto. Kehadirannya dinilai penting untuk mendorong penyelesaian persoalan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kondisi Jalan Daan Mogot yang memerlukan penanganan lintas sektor. Permasalahan di ruas jalan tersebut tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.



Warga saat menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Reses Dapil II di Kampung Timbangan, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper



Terkait penanganan banjir, Teja menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Ia menilai bahwa penanganan secara parsial tidak akan memberikan solusi jangka panjang.

"Permasalahan banjir di kawasan permukiman harus diselesaikan melalui solusi konkret, salah satunya dengan pembenahan sistem drainase yang terintegrasi, termasuk optimalisasi gorong-gorong di sepanjang ruas jalan utama," jelasnya.

Selain persoalan banjir, aspek keselamatan pengguna jalan juga menjadi perhatian penting. DPRD mendorong pembangunan jembatan penyeberangan orang di titik-titik rawan guna meningkatkan keselamatan masyarakat.

"Kami mendorong pembangunan jembatan penyeberangan orang sebagai upaya meningkatkan keselamatan masyarakat, mengingat tingginya arus lalu lintas di kawasan ini," tambah Teja.

Ia juga menyoroti rencana pembangunan *underpass* di kawasan Poris sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi perlintasan sebidang yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Namun demikian, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui dukungan pemerintah pusat.

Di samping itu, kebutuhan program Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Batuceper juga masih cukup tinggi. Teja berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, salah satu warga RW 02 Kelurahan Batusari, Simon, menyampaikan bahwa kondisi Jalan Daan Mogot saat ini belum memberikan rasa aman bagi pejalan kaki. Ia berharap adanya perhatian serius terhadap penyediaan trotoar sebagai bagian infrastruktur dasar.

"Jalan Daan Mogot sering mengalami kepadatan lalu lintas, namun belum dilengkapi dengan trotoar yang memadai. Kondisi ini cukup berisiko bagi pejalan kaki, terutama pada jam sibuk," ungkap Simon. ■ SIN



Teja Kusuma
Anggota Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan

DAPIL III CIPONDOH, PINANG

IDUP, ANGGOTA KOMISI III FRAKSI PAN-PPP

TUNGGU PENYERAHAN ASET PSU, DPRD BERIKAN SOLUSI SESUAI KEWENANGAN



ANGGOTA DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Idup, melaksanakan kegiatan Reses Kedua masa sidang 2025-2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kota Tangerang. Kegiatan tersebut berlangsung di RW 002, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, pada Minggu (29/3/2026).

Reses ini menjadi bagian dari agenda rutin DPRD Kota Tangerang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kehadiran ratusan warga dalam kegiatan ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan mereka.



Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar lingkungan, khususnya terkait penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur jalan. Kedua isu ini dinilai masih menjadi persoalan utama di wilayah Kecamatan Cipondoh.

Menanggapi hal tersebut, Idup menegaskan bahwa persoalan banjir dan infrastruktur merupakan pekerjaan rumah bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang yang memerlukan penanganan secara terintegrasi.

"Permasalahan utama di Dapil III ini masih berkisar pada banjir dan infrastruktur jalan. Banjir bukan hanya menjadi persoalan masyarakat setempat, tetapi merupakan isu yang harus ditangani secara menyeluruh di tingkat Kota Tangerang," ujar Idup.



Ia menambahkan bahwa upaya penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor serta perencanaan yang matang agar solusi yang dihasilkan dapat bersifat jangka panjang.

Selain itu, dalam dialog bersama warga turut mengemuka persoalan terkait status kawasan Taman Royal 3 di Kelurahan Poris Plawad yang hingga saat ini belum terselesaikan. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah daerah.

Idup menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang belum dapat melakukan intervensi pembangunan sebelum adanya penyerahan resmi aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah.

"Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah harus didahului dengan penyerahan aset PSU. Tanpa itu, pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi pembangunan. Namun demikian, DPRD melalui program pokok-pokok pikiran tetap berupaya memberikan solusi sesuai kewenangan yang ada," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, warga berharap agar permasalahan status aset di kawasan Taman Royal 3 dapat segera diselesaikan. Kejelasan status aset dinilai menjadi kunci agar masyarakat dapat mengakses program pembangunan pemerintah secara optimal.

Ketua Forum RT/RW Poris Plawad, Mulyadi, menyampaikan bahwa selama ini masyarakat masih mengandalkan swadaya dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur lingkungan. Ia berharap adanya solusi konkret dari pemerintah daerah melalui dukungan DPRD.

"Kami berharap ada kejelasan terkait status wilayah kami. Apabila aset telah diserahkan kepada pemerintah, maka masyarakat dapat mengusulkan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang sebagaimana wilayah lainnya," ungkap Mulyadi. ■ SIN



Idup
Anggota Komisi III Fraksi PAN-PPP

BAGUS TRIYANTO, ANGGOTA KOMISI IV FRAKSI DEMOKRAT

MESIN POMPA AIR DAN FOGGING UNTUK MENUNJANG KEBUTUHAN LINGKUNGAN



ANGGOTA DPRD Kota Tangerang, Bagus Triyanto, melaksanakan kegiatan Reses Kedua masa sidang 2025-2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi wilayah Cipondoh dan Pinang. Kegiatan tersebut berlangsung di Sport Centre, Cluster Cattleya, Kecamatan Pinang, pada Minggu (29/3/2026).

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari agenda DPRD Kota Tangerang dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Forum ini menjadi sarana penting untuk menjaring berbagai masukan terkait kebutuhan pembangunan di tingkat lingkungan.



Dalam kesempatan tersebut, Bagus Triyanto menerima berbagai aspirasi masyarakat yang mencakup sejumlah isu strategis. Di antaranya terkait kondisi lingkungan, sistem drainase, pembangunan fasilitas sosial, serta permasalahan banjir yang menjadi perhatian utama warga.

Permasalahan banjir dinilai sebagai isu yang paling mendesak untuk segera ditangani. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan infrastruktur di wilayah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Bagus menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.



"Kami akan fokus dan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam pembangunan drainase, penataan lingkungan, serta infrastruktur guna mengatasi permasalahan banjir. Sebagai perwakilan masyarakat di Dapil ini, aspirasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti secara bertahap," ujar Bagus.

Ia menjelaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, pendekatan yang komprehensif menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan banjir, yakni melalui penanganan dari hulu hingga hilir serta perbaikan sistem drainase yang ada.

"Permasalahan banjir harus ditangani secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Upaya ini akan dimulai dari perbaikan drainase serta identifikasi titik-titik rawan banjir agar penanganannya lebih tepat sasaran," jelasnya.

Dalam forum tersebut, warga juga menyampaikan berbagai kebutuhan pendukung lingkungan, termasuk sarana penunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Ketua RW 02 Kelurahan Cipete, Amril Mutoi, menyampaikan bahwa sejumlah program yang telah dijalankan oleh Bagus Triyanto dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses kali ini dapat segera direalisasikan.

"Kami membutuhkan dukungan berupa sarana seperti mesin pompa air dan fogging untuk menunjang kebutuhan lingkungan. Harapan kami, usulan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang," ungkap Amril.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. ■ SIN


Bagus Triyanto
Anggota Komisi IV Fraksi Demokrat

DAPIL IV KARANG TENGAH, CILEDUG, LARANGAN

ALRIZOMA AKROM, ANGGOTA KOMISI IV FRAKSI PDI PERJUANGAN

PERBAIKAN DAN NORMALISASI SISTEM DRAINASE BELUM OPTIMAL



KEGIATAN reses menjadi agenda strategis bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi serta memastikan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga.

Hal tersebut dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Alrizoma Akrom, dalam kegiatan Reses Kedua masa sidang 2025–2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Kegiatan ini berlangsung di Komplek Ciledug Indah 2 Blok C14/13 RT 002/RW 009, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, pada Minggu (29/3/2026).

Kegiatan reses ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi secara langsung kepada wakil rakyat. Melalui forum ini, diharapkan tercipta komunikasi yang efektif antara masyarakat dan DPRD.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah isu strategis mengemuka, terutama terkait persoalan banjir yang masih kerap terjadi di wilayah tersebut. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas dan kenyamanan masyarakat.



Selain itu, kebutuhan akan perbaikan dan normalisasi sistem drainase juga menjadi perhatian utama warga. Sistem drainase yang belum optimal dinilai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya genangan air di lingkungan permukiman.

Permasalahan infrastruktur lingkungan turut disampaikan oleh masyarakat, termasuk kondisi jalan lingkungan yang membutuhkan perbaikan guna menunjang mobilitas warga sehari-hari.

Di samping itu, layanan pengangkutan sampah juga menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam forum tersebut. Warga berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Alrizoma Akrom menegaskan bahwa persoalan banjir, drainase, infrastruktur, dan pengelolaan sampah merupakan isu prioritas yang perlu



Permasalahan banjir dan drainase masih menjadi keluhan utama warga, di samping infrastruktur lingkungan dan layanan pengangkutan sampah yang perlu terus ditingkatkan

mendapatkan penanganan serius dari pemerintah daerah.

"Permasalahan banjir dan drainase masih menjadi keluhan utama warga, di samping infrastruktur lingkungan dan layanan pengangkutan sampah yang perlu terus ditingkatkan," ujar Akrom.

Ia menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku, dengan melibatkan perangkat daerah terkait agar penanganannya dapat dilakukan secara optimal.

"Aspirasi ini akan kami teruskan dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga dapat segera direspons oleh instansi terkait," tegasnya.

Kegiatan reses ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. ■ **SIN**



Alrizoma Akrom
Anggota Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan

DADAN SYAHRUDIN, ANGGOTA KOMISI IV FRAKSI PAN-PPP

EVALUASI KUALITAS JALAN YANG BARU DIPERBAIKI AGAR BERTAHAN LAMA



KETUA Fraksi PAN-PPP DPRD Kota Tangerang yang juga Anggota Komisi IV, Dadan Syahrudin, melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, pada Sabtu (28/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda reses masa sidang yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan.

Reses tersebut berlangsung di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang menjadi wilayah representasi Dadan Syahrudin dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif. Melalui kegiatan ini, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat lingkungan dapat disampaikan secara terbuka dan terarah.

Pelaksanaan reses di Kelurahan Tajur disambut dengan antusias oleh masyarakat. Kehadiran warga dari berbagai unsur menunjukkan tingginya partisipasi publik dalam menyampaikan kebutuhan serta harapan terhadap pembangunan di wilayahnya.

Dalam forum tersebut, persoalan banjir menjadi isu yang paling dominan disampaikan warga. Genangan air yang kerap terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi dinilai masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara optimal.

Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, banjir juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan, baik dari sisi kesehatan lingkungan maupun kerugian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, warga berharap adanya langkah konkret dan berkelanjutan dalam penanganannya.

Menanggapi hal tersebut, Dadan Syahrudin menegaskan bahwa persoalan banjir akan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD Kota Tangerang.

"Permasalahan banjir ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Saya akan mendorong agar penanganannya dilakukan secara komprehensif, mulai dari perbaikan drainase hingga normalisasi saluran air," ujarnya.

Selain persoalan banjir, warga juga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan rusak yang dinilai kerap terjadi berulang meskipun telah dilakukan perbaikan sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian karena berdampak langsung pada mobilitas masyarakat.

Kerusakan jalan yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kualitas pekerjaan yang telah dilakukan. Warga berharap adanya peningkatan mutu pembangunan agar hasil perbaikan dapat bertahan lebih lama.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dadan menyampaikan komitmennya untuk berkoordinasi dengan dinas terkait guna memastikan perbaikan jalan dilakukan secara optimal dan sesuai standar yang ditetapkan.

"Kami tidak ingin perbaikan hanya bersifat sementara. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan agar jalan yang diperbaiki bisa bertahan lama," tegasnya.

Di akhir kegiatan, Dadan menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses ini akan menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD untuk diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat yang telah menyampaikan masukan secara konstruktif demi kemajuan wilayah, khususnya di Dapil IV. ■ SIN



DAPIL V JATIUWUNG, CIBODAS, PERIUK

ANGGIAT SITOHANG, ANGGOTA KOMISI III FRAKSI NASDEM

PEMKOT TANGERANG BEBASKAN LAHAN SELUAS 1,6 HEKTARE, UNTUK PEMBANGUNAN EMBUNG





KEGIATAN reses masa sidang kedua kembali dimanfaatkan Anggota DPRD Kota Tangerang dari Komisi III Fraksi Partai NasDem, Anggiat Sitohang, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung. Kali ini, reses dilaksanakan di wilayah RW 14, Kecamatan Cibodas, dengan fokus pada berbagai persoalan infrastruktur dan lingkungan yang dihadapi warga.

Pelaksanaan reses tersebut berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Warga tampak antusias mengikuti kegiatan sejak awal hingga akhir, memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang selama ini menjadi perhatian di lingkungan mereka.

Sejumlah persoalan strategis mengemuka dalam dialog antara warga dan anggota dewan. Permasalahan banjir menjadi isu dominan yang disampaikan, mengingat wilayah tersebut kerap terdampak genangan air saat intensitas hujan meningkat.

Warga mengungkapkan bahwa sistem drainase yang ada saat ini dinilai belum mampu mengakomodasi debit air secara optimal. Akibatnya, genangan air tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan.

Selain persoalan banjir, aspek infrastruktur pendukung seperti trotoar juga menjadi sorotan. Warga menilai masih terdapat sejumlah ruas jalan yang belum memiliki fasilitas trotoar yang memadai, serta beberapa titik yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu keselamatan pejalan kaki.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggiat Sitohang menyampaikan komitmennya untuk mengawal dan menindaklanjuti setiap masukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa persoalan infrastruktur dasar merupakan bagian penting dari prioritas pembangunan daerah yang harus ditangani secara terencana dan berkelanjutan.



Dalam kesempatan tersebut, Anggiat juga menjelaskan bahwa upaya penanganan banjir telah mulai diinisiasi oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui pembangunan embung sebagai salah satu solusi jangka panjang. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pengendali debit air di kawasan terdampak.

"Pemerintah Kota Tangerang telah membebaskan lahan seluas 1,6 hektare yang berlokasi di Jalan Dharmawangsa untuk pembangunan embung. Ini merupakan langkah konkret dalam upaya mengurangi risiko banjir, dan kami akan terus mengawal agar pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan," ujar Anggiat Sitohang.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kegiatan reses memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Melalui forum ini, berbagai aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan penganggaran.



"Kami berkomitmen untuk memastikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara optimal. Reses bukan hanya menjadi sarana penyerapan aspirasi, tetapi juga bentuk akuntabilitas kami sebagai wakil rakyat," tambahnya.

Ketua RW 14, Subandi, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses yang dinilai memberikan ruang komunikasi yang efektif antara masyarakat dan DPRD. Ia menilai kehadiran langsung anggota dewan di tengah masyarakat menjadi bentuk perhatian nyata terhadap berbagai persoalan yang ada.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan reses ini. Warga dapat menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi, dan kami berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan, khususnya terkait banjir dan perbaikan trotoar, dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah kami," tutup Subandi. ■ SIN

JUNADI, KETUA KOMISI I FRAKSI PARTAI GERINDRA

MINTA DIBANGUN JOGGING TRACK SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN CAR FREE DAY

KETUA Komisi I DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Gerindra, Junadi, melaksanakan kegiatan reses pada masa sidang 2025-2026 yang digelar pada Minggu, (29/3/26), di Kampung Cikoneng Ilir RW 02, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, yang termasuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) V. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda konstitusional anggota dewan dalam menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.



Pelaksanaan reses tersebut berlangsung dengan partisipasi aktif warga yang hadir. Antusiasme masyarakat terlihat dari keterlibatan dalam sesi dialog yang dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Dalam sambutannya, Junadi menegaskan bahwa reses merupakan instrumen penting dalam menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah. Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum ini menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang tepat sasaran.



Junadi
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang

Menurutnya, komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat memungkinkan adanya sinkronisasi antara kebutuhan riil di lapangan dengan perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

"Melalui reses ini, kami dapat mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kami kawal agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Junadi.

Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan infrastruktur lingkungan. Beberapa wilayah di Kampung Cikoneng Ilir masih membutuhkan pembangunan turap guna mengantisipasi potensi longsor dan genangan air, terutama saat musim hujan.

Selain itu, kebutuhan pembangunan trotoar juga menjadi perhatian warga.



Fasilitas pedestrian dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, khususnya bagi pejalan kaki di lingkungan permukiman.

Tidak hanya itu, warga dari Kelurahan Jatake turut menyampaikan usulan pembangunan jogging track sebagai sarana olahraga sekaligus penunjang kegiatan *Car Free Day* (CFD) agar dapat berjalan lebih tertata dan nyaman.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Junadi menyampaikan komitmennya untuk mengawal setiap usulan agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Tangerang.

Ia menegaskan bahwa pasca pelaksanaan reses, seluruh aspirasi yang telah dihimpun akan segera dibahas bersama perangkat daerah terkait guna memastikan adanya langkah konkret dalam realisasinya.

"Seluruh aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti melalui pembahasan di DPRD. Kami akan mendorong agar usulan yang disampaikan dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah," tambahnya.

Ketua RW 02 Kampung Cikoneng Ilir, Yudhi Ferdian, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Junadi. Ia menilai kehadiran anggota dewan secara langsung di tengah masyarakat memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Yudhi berharap agar pendampingan terhadap pembangunan di wilayahnya dapat terus berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berorientasi pada kebutuhan warga. ■ SIN





FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi (tengah), Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tangerang, Ridwan Akbar, Wakil Ketua Komisi I Agus Al Anshory, Anggota Komisi I Christian Lois, Sekretaris Diskominfo Kota Tangerang Nurhidayatullah (kiri), saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Diskominfo di Ruang Komisi I, Rabu (8/4/2026).

RDP KOMISI I SOROTI KINERJA DISKOMINFO, SOSIALISASI PROGRAM DIMINTA LEBIH OPTIMAL

KOMISI I DPRD Kota Tangerang mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang untuk lebih optimal dalam menyosialisasikan program serta meningkatkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi, menegaskan bahwa program yang dijalankan Diskominfo tidak hanya sebatas terealisasi secara administratif, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, capaian program perlu diukur dari dampaknya terhadap publik, bukan sekadar pemenuhan target kinerja semata.

"Kami melihat sejumlah program Diskominfo telah mencapai target, meskipun masih terdapat sisa anggaran. Ke depan, kami mendorong agar program dan pemanfaatan anggaran tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Junadi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Diskominfo di Ruang Komisi I, Rabu (8/4/2026).

Ia juga menambahkan bahwa Diskominfo harus mampu menjawab tantangan masyarakat melalui penguatan program digitalisasi yang tepat sasaran.

"Kita jangan terfokus pada pengulangan target kinerja formal, namun juga fokus pada kebermanfaatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tangerang, Ridwan Akbar, menyoroti penurunan partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi Laksa sebagai kanal pengaduan warga dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menilai hal tersebut menjadi catatan penting, mengingat tren masyarakat saat ini semakin bergeser ke arah digitalisasi.

"Itu menjadi catatan karena di zaman yang semakin maju, masyarakat sudah beralih ke digital. Namun, partisipasi digital di Kota Tangerang justru menurun. Setelah kami konfirmasi, terdapat kendala dari sisi infrastruktur sistem," jelasnya.

Ridwan berharap Diskominfo dapat terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja yang masih perlu dibenahi.

Dengan demikian, seluruh program yang dijalankan Pemerintah Kota Tangerang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Rapat Dengar Pendapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi I Agus Al Anshory, Anggota Komisi I Christian Lois, Sekretaris Diskominfo Kota Tangerang Nurhidayatullah, beserta jajaran. ■ **SIN/ERD**

DESENTRALISASI PENGOLAHAN SAMPAH

RDF DIUSULKAN HADIR DI TIAP KECAMATAN



FOTO: PEMKOT KOTA TANGERANG

Area pengolahan sampah dengan Teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang, Senin (9/12/24).

KOMISI IV DPRD Kota Tangerang mengusulkan penerapan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) dilakukan secara terdesentralisasi hingga tingkat kecamatan. Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Tangerang.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Supiani, menyampaikan bahwa selama ini pengolahan RDF masih terpusat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing. Menurutnya, pola tersebut perlu dikaji ulang agar penanganan sampah dapat lebih optimal.

Ia menjelaskan, volume sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing setiap hari berkisar antara 500 hingga 1.000 ton. Dengan jumlah sebesar itu, pengolahan sampah di satu titik dinilai tidak lagi efektif dalam jangka panjang.

"Pengelolaan RDF di satu titik akan kurang efektif. Sebaiknya dipecah ke beberapa kecamatan untuk mengurangi penumpukan pengolahan sampah yang selama ini terfokus di TPA Rawa Kucing," ujar Supiani, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, penerapan RDF di tingkat kecamatan perlu diawali dengan uji coba untuk memastikan kesiapan teknis dan operasional. Apabila hasilnya optimal, program tersebut dapat dilanjutkan bahkan dikembangkan secara lebih luas.

Dalam proses tersebut, Supiani menekankan pentingnya dukungan serta pengawasan dari Pemerintah Kota Tangerang agar implementasi berjalan sesuai dengan perencanaan.

"Kita perlu memperbaiki dari hulu di masing-masing kecamatan, sehingga TPA Rawa Kucing nantinya hanya menerima sampah yang sudah melalui proses pengolahan. Hasilnya juga bisa didistribusikan menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Ia berharap, pengelolaan sampah di Kota Tangerang ke depan semakin berkembang dan inovatif, tidak lagi bertumpu pada penumpukan di TPA semata, melainkan mengarah pada sistem pengolahan yang berkelanjutan.

"Harapannya, Kota Tangerang dapat menuju konsep *zero waste* melalui pengelolaan sampah yang lebih kreatif dan terintegrasi," tutup Supiani. ■ **SIN/ERD**



Supiani
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang.

PENERTIBAN PASAR SIPON

DIMINTA LEBIH KOLABORATIF DENGAN MELIBATKAN PERAN MASYARAKAT

KOMISI I DPRD Kota Tangerang mengimbau agar penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Sipon dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ketertiban yang berkelanjutan di sepanjang Jalan Irigasi Sipon.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Samsuni, meminta Pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menggandeng tokoh masyarakat setempat dalam proses pengawasan dan penertiban para pedagang.

Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat dapat mendorong kesadaran kolektif di kalangan pedagang agar mematuhi aturan yang berlaku, sehingga tercipta kenyamanan tidak hanya bagi pembeli, tetapi juga bagi pengguna jalan.



FOTO: ANTARA FOTO

Penertiban PKL di Pasar Sipon yang dilakukan aparat gabungan sebelum Lebaran 2026.

"Sering kali pedagang yang sudah ditertibkan masih melanggar dan berjualan tidak pada tempatnya. Karena itu, kerja sama dengan masyarakat perlu dilakukan guna menjaga keamanan dan kenyamanan bersama," ujar Samsuni saat dimintai keterangan melalui telepon, Jumat (3/4/2026).

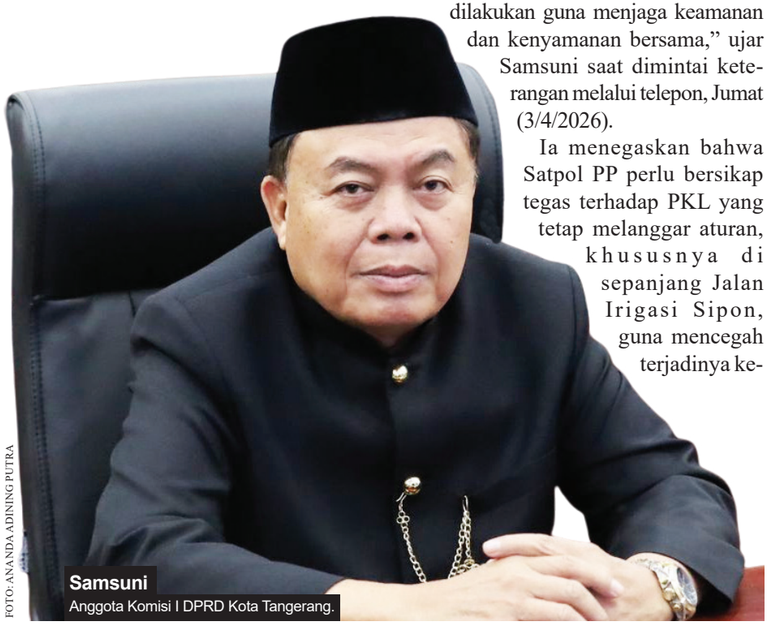


FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

Samsuni
Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang.

Ia menegaskan bahwa Satpol PP perlu bersikap tegas terhadap PKL yang tetap melanggar aturan, khususnya di sepanjang Jalan Irigasi Sipon, guna mencegah terjadinya kesemrawutan di kawasan tersebut.

"Pihak Satpol PP tidak boleh pandang bulu dalam melakukan penertiban, harus bertindak tegas. Jangan menunggu masalah, karena dikhawatirkan akan lebih sulit ditangani jika kondisi sudah semrawut," tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut berharap Pemerintah Kota Tangerang bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan Pasar Sipon yang tertib dan nyaman.

"Kolaborasi yang dilakukan akan mempermudah terwujudnya kebersihan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat di lingkungan Pasar Sipon Kota Tangerang," pungkas Samsuni. ■ **SIN/ERD**



PENGEMBANGAN AEROTROPOLIS

OPTIMALISASI TRANSPORTASI PUBLIK TERINTEGRASI JADI PENOPANG UTAMA



FOTO: IST

Konsep pembangunan infrastruktur Aerotropolis ini memiliki efek berganda *(multiplier effect)* bagi perekonomian daerah. Selain meningkatkan nilai investasi, potensi kemacetan akan semakin besar, diperlukan antisipasi peningkatan infrastruktur dan optimalisasi transportasi publik terintegrasi.

DPRD Kota Tangerang menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan kawasan Aerotropolis yang digagas Pemerintah Kota Tangerang. Program ini dinilai strategis dalam mengoptimalkan posisi Kota Tangerang sebagai wilayah penyangga yang terintegrasi dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Aerotropolis harus diiringi dengan penguatan infrastruktur transportasi publik yang memadai dan terintegrasi. Hal ini menjadi krusial mengingat tingginya mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.

"Kapastitas jalan saat ini sudah tidak lagi mencukupi. Jika Kota Tangerang menjadi daerah lintasan tanpa diimbangi peningkatan infrastruktur, potensi kemacetan akan semakin besar dan perlu diantisipasi sejak dini," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, pembangunan sistem transportasi publik yang terhubung dengan jaringan regional Jabodetabek menjadi kebutuhan mendesak. Konektivitas antardaerah diharapkan mampu menekan beban lalu lintas sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat.

Selain itu, pengembangan simpul-simpul transportasi seperti stasiun dan terminal dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Konsep ini sejalan dengan pengembangan wilayah berbasis transit yang semakin relevan di kawasan perkotaan.

"Karena itu, pengembangan sarana transportasi publik menjadi hal yang penting. Titik simpul seperti stasiun atau terminal dapat menjadi pusat pertumbuhan baru dalam pengembangan wilayah, dan itu yang paling utama," ucap Rusdi.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kejelasan skema pembiayaan dan investasi dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, sinergi lintas pemerintah menjadi faktor kunci dalam merealisasikan program strategis ini.

"Ke depan, perlu pembahasan lebih lanjut mengenai pembagian tanggung jawab, skema pembiayaan, serta pola investasi agar pengembangan ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan," tutupnya. ■ **SIN/DSW**

PERKUAT KETAHANAN PANGAN

SIAPKAN LANGKAH ANTISIPATIF HADAPI KETIDAKPASTIAN GLOBAL







ILUSTRASI FOTO: ANTARA FOTO/PUTRA M. AKBAR

Petugas Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang mendata harga daging sapi saat sidak pengawasan pangan di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten.

DPRD Kota Tangerang mendorong penguatan ketahanan pangan sebagai langkah strategis dalam menghadapi potensi krisis global dan ancaman resesi ekonomi. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pokok di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang perlu mengambil langkah konkret dan terukur guna memastikan pasokan pangan tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat.

"Pemkot harus aktif menjaga stabilitas pangan melalui berbagai upaya, salah satunya dengan rutin menggelar operasi pasar guna memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat," ujarnya saat dihubungi, Selasa (7/4/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran distribusi logistik pangan, khususnya dari wilayah penyangga. Menurutnya, gangguan distribusi dapat berdampak langsung pada ketersediaan dan memicu lonjakan harga bahan pokok.

Dalam upaya memperkuat jejaring sosial dan bantuan pangan, Gatot meminta Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah, Bulog, serta Badan Usaha Milik Daerah.

"Koordinasi yang baik antar seluruh pihak sangat penting agar pengelolaan bantuan subsidi pangan tepat sasaran dan efektif. Selain itu, strategi ketahanan pangan jangka panjang harus menjadi perhatian serius, mengingat semakin terbatasnya lahan pertanian di wilayah perkotaan," jelasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang tersebut juga mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan *urban farming* dan pemanfaatan lahan terbatas di kawasan perkotaan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberian bantuan bibit kepada masyarakat serta optimalisasi ruang terbuka hijau agar dapat dimanfaatkan secara produktif dalam mendukung ketersediaan pangan.

"Pemerintah perlu fokus pada pengembangan lahan dan *urban farming*, mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pribadi, serta memperkuat bantuan bibit dan edukasi. Ruang terbuka hijau juga harus dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan pangan," tutup Gatot. ■ **SIN/DSW**

FOTO: ANANDA ADINING PUTRA



Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi (kanan), menyatakan dukungan terhadap program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan timbulan sampah di Kota Tangerang.

DPRD DUKUNG LSDP TANGANI SAMPAH KOTA TANGERANG

DPRD Kota Tangerang menyatakan dukungan terhadap program *Local Service Delivery Improvement Project* (LSDP) yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan timbulan sampah di Kota Tangerang. Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, menyampaikan bahwa permasalahan sampah di Kota Tangerang sudah berada pada tahap yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi. Terlebih, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing saat ini menerima beban hingga sekitar 1.600 ton sampah per hari.

"Kami di DPRD Kota Tangerang mendukung penuh program LSDP dari Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya konkret dalam mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks, khususnya di TPA Rawa Kucing yang setiap harinya menerima hingga 1.600 ton sampah. Jadi, program ini nantinya difokuskan untuk mengatasi timbulan sampah harian," ujarnya, Kamis (9/4/26).

Ia menjelaskan bahwa dukungan tersebut juga diperkuat dengan kesiapan lahan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, yakni di lokasi eks Pabrik Ciki yang telah dibebaskan sejak tahun lalu. Lahan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari implementasi solusi pengelolaan sampah yang lebih modern.

"Pemerintah Kota Tangerang telah menyiapkan lahan di eks Pabrik Ciki yang sudah dibebaskan tahun lalu sebagai bagian dari dukungan terhadap program ini. Kami melihat ini sebagai langkah maju yang perlu dikawal bersama agar implementasinya berjalan optimal," lanjutnya.

Lebih lanjut, Rusdi menuturkan bahwa Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan penggunaan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) sebagai salah satu metode pengolahan sampah. Namun demikian, DPRD Kota Tangerang juga mendorong adanya kajian dan penerapan alternatif lain yang dapat memperkuat sistem pengurangan sampah dari hulu hingga hilir.

"Kami tidak hanya berfokus pada satu metode, tetapi juga mendorong berbagai opsi lain dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan di sumber, penguatan daur ulang, hingga pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pendekatannya harus komprehensif dari hulu ke hilir," tegasnya.

Dengan adanya dukungan terhadap program LSDP ini, DPRD Kota Tangerang berharap persoalan sampah dapat ditangani secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan Kota Tangerang yang lebih bersih dan sehat. ■ **SIN**

WFH ASN AGAR LEBIH ADAPTIF

PELAYANAN PUBLIK TETAP JADI PRIORITAS

DPRD Kota Tangerang mendorong penerapan kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dilakukan secara adaptif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 1 April 2026.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung implementasi kebijakan tersebut sepanjang tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan pelayanan langsung.

"Prinsipnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang atau terganggu. OPD yang memberikan layanan langsung harus menjadi perhatian utama dalam pengaturan mekanisme WFH," ujar Rusdi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, kebijakan WFH merupakan langkah strategis dalam merespons dinamika global, termasuk upaya efisiensi penggunaan bahan bakar. Selain itu, pengalaman penerapan sistem kerja serupa pada masa pandemi COVID-19 dapat menjadi referensi penting dalam implementasi kebijakan saat ini.

"Kami optimistis kebijakan ini tidak akan mengganggu kinerja Pemerintah Kota Tangerang. Tinggal menunggu pengaturan teknisnya, apakah melalui pembagian hari kerja atau mekanisme lain yang tepat," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Christian Lois, menilai bahwa penerapan WFH tidak sebaiknya dilakukan secara penuh. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja jarak jauh dan kehadiran langsung di kantor.

"Penerapan WFH perlu diatur dengan sistem kerja yang fleksibel, seperti sistem bergilir atau pembagian proporsi kerja, misalnya 50 persen WFH dan 50 persen *Work From Office*. Yang terpenting adalah metode pelaksanaannya dipikirkan secara matang," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak seluruh masyarakat memiliki akses maupun pemahaman terhadap layanan berbasis digital. Karena itu, pelayanan tatap muka masih menjadi kebutuhan penting, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi.

"Kami pada prinsipnya mendukung kebijakan ini selama dirancang secara rasional dan didukung dengan sistem kerja yang optimal, sehingga pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama," tutupnya. ■ **SIN/DSW**



Ilustrasi pegawai ASN Kota Tangerang saat apel pagi di Gedung Pemerintahan Kota Tangerang.

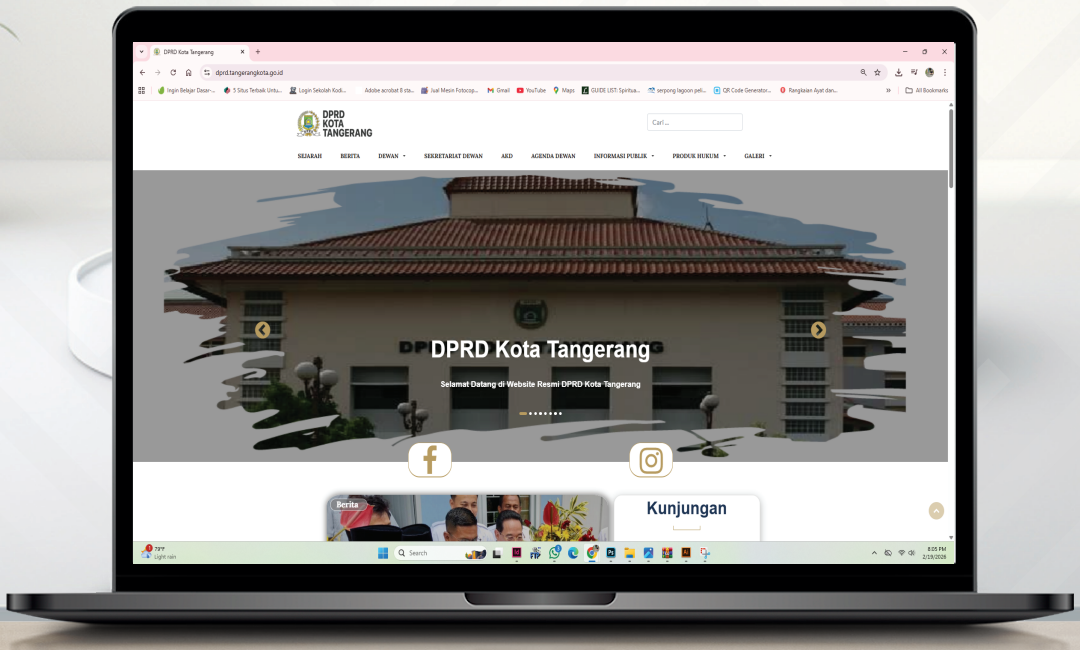
FOTO: ANANDA ADINING PUTRA

DPRD
Kota Tangerang

INFORMASI LENGKAPNYA DI WEBSITE KAMI

SCAN QR CODE
Untuk Informasi Lengkapnya

https://dprd.tangerangkota.go.id



dprdkotatangerang | dprd.tangerangkota.go.id | dprdkotatangerang | DPRDKotaTng